

**BAB II**  
**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA ERA**  
**SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**A. Tujuan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia**

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memiliki landasan yang kuat dan kokoh. Landasan tersebut tercantum pada alinea pertama dan ke-4 Pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pasal 11 yang termasuk didalamnya. Dalam alinea pertama tersebut menyebutkan, “penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Sedangkan dalam alinea ke-4 menyatakan, “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” sedangkan pada pasal 11 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Selain landasan tersebut, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif juga berdasarkan keterangan pemerintah di depan sidang BP-KNIP pada tanggal 2 September 1948. Dimana keadaan pada saat itu, negara-negara dunia terpecah ke dalam dua blok yang saling berperang (perang dunia ke-2). Dan Indonesia memproklamkan posisinya tidak memihak pada blok manapun. Sifat bebas-aktif Indonesia tersebut tetap diabadikan sampai saat ini untuk mencapai

kepentingan dan tujuan nasional dari bangsa Indonesia sebagaimana termaktum dalam pembukaan UUD 1945 seperti yang telah dikemukakan oleh penulis di atas.

Agar prinsip bebas-aktif tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional Politik Luar Negerinya yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Pada masa Orde Lama, landasan operasional politik luar negeri sebagian besar dinyatakan dalam maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno, antara lain maklumat politik pemerintah yang dikeluarkan pada 1 November 1945, Pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita (Jarek)’ pada tanggal 17 Agustus 1960, serta pernyataan Presiden Soekarno dalam “Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia”, yang ditetapkan sebagai garis-garis besar Politik Luar Negeri Indonesia, dengan keputusan Dewan Pertimbangan Agung No. 2/kpts/Sd?I/61 tanggal 19 Januari 1961.<sup>12</sup> (Wuryandari,Ed 2008)

Pada masa Orde Baru, landasan operasional Politik Luar Negeri Indonesia semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya : ketetapan MPRS no.XII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, ketetapan MPRS tanggal 22 Maret 1973, petunjuk Presiden 11 April 1973, petunjuk bulanan Presiden sebagai ketua Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan, serta keputusan-keputusan Menteri

---

<sup>12</sup> Reni Windiani, (2007), *Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi*. Jurnal. Hal.2

Luar Negeri. Disamping itu, landasan operasional Politik Luar Negeri Indonesia yang dituangkan dalam TAP MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu: TAP MPR RI. No. IV/MPR/1973 TAP MPR RI No.IV/MPR/1978; TAP MPR RI No.II/MPR/1983; TAP MPR RI No.II/MPR/1988; dan TAP MPR RI No.II/MPR/1993.<sup>13</sup>

Setelah reformasi digulirkan, dua kabinet yaitu Kabinet Gotong Royong (2001-2004) yang mengoperasikan Politik Luar Negeri Indonesia melalui : ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 yang menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997, UU no. 37 tahun 1999 tentang pengaturan aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri, UU no. 24 tentang perjanjian Internasional yang menekankan pada pentingnya penciptaan suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasional, dan perubahan UUD 1945 pada beberapa pasal, khusus untuk hubungan luar negeri perubahan ada pada pasal 13. Pada kabinet selanjutnya yakni Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Kabinet ini meletakkan landasan operasional Politik Luar negeri pada tiga rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2004-2009 yang isinya:

1. Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah

---

<sup>13</sup> *ibid* hal. 3

meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi dalam proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional. Langkah ini sejalan dengan pidato Bunk Hatta pada 15 desember 1945, yang menyatakan bahwa “politik luar negeri yang dijalankan oleh negara mestilah sejalan dengan politik dalam negeri”. Seluruh rakyat harus berdiri dengan tegak dan rapat dibelakang pemerintah Republik Indonesia. sebagaimana lebih lanjut disampaikan oleh Hatta, bahwa “persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam diplomasi yang dijalankan”.

2. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai *concentric circle* utama politik luar negeri Indonesia.
3. Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Komitmen terhadap perdamaian internasional relevan

dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa, sebagaimana dituangkan dalam alinea IV pembukaan undang-undang dasar 1945.<sup>14</sup>

Politik luar negeri Indonesia di atur dalam UU nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang dilaksanakan melalui diplomasi aktif. UU ini mengatur aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri yang meliputi sarana, mekanisme pelaksanaan hubungan luar negeri, perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri termasuk perwakilan dan konsulat diluar negeri.

Pada pasal tiga UU no 37 tahun 1999 menyatakan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia diabadikan untuk kepentingan nasional. Politik luar negeri juga dilaksanakan dengan diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.<sup>15</sup>

## **B. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia**

Kepentingan nasional (*national interest*) didefinisikan sebagai kepentingan negara yang dicapai melalui kebijakan nasional.<sup>16</sup> Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan produk dari berbagai faktor dan kondisi yang bersifat tetap maupun berubah untuk suatu waktu tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, kebijakan luar negeri jelas merupakan bagian dari kebijakan pemerintah

---

<sup>14</sup> *Op.Cit* hal 6

<sup>15</sup> UU RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

<sup>16</sup> Daniel S, Papp, *Contemporary International Relations*, hlm 3

yang direncanakan dan dilaksanakan demi kepentingan nasional. Adapun kepentingan nasional tersebut, menurut pendapat Moenir Ari Soenada,<sup>17</sup> pada dasarnya terbagi atas dua faktor yaitu faktor tetap dan faktor berybah yang dikaitkan dengan waktu dan totalitas bangsa.

*Pertama*, faktor-faktor yang tetap itu pada umumnya diputuskan sesuai dengan sistem politik dan koridor konstitusinya, yang menyangkut perlindungan bangsa seperti kemerdekaan politik, kemampuan memelihara kesatuan wilayah dan penduduk, dan keselamatan lembaga-lembaga masyarakat dan negara untuk tumbuh berkembang. Muatan dari faktor tetap tersebut dapat turut memuat sejumlah unsur prinsipil seperti mitos nasional dan falsafah negara yang disetujui rakyat. *Kedua*, faktor-faktor yang berubah diputuskan oleh eksekutif karena tekanan-tekanan kebutuhan baik oleh pemerintah itu sendiri, oleh badan legislative atau oleh berbagai kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi para pembuat keputusan.

Kepentingan nasional merupakan sebuah faktor yang agak bias dalam kebijakan politik suatu negara. hal ini lebih dikarenakan rumitnya menentukan faktor-faktor penentu sebuah hal dikatakan atau didefinisikan sebagai kepentingan nasional, terlebih membedakan antara kepentingan elit politik pembuat kebijakan dengan kepentingan nasional secara umum.

---

<sup>17</sup>[www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id) Moenir Ari Soenada, "Kebijakan Luar Negeri dan Strategi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik", diakses pada tanggal 9 April 2016

Kepentingan nasional adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kehidupan bangsa dan negara. Hal ini jelas berbeda dengan kepentingan golongan, yang lebih kecil konteks permasalahannya. Walaupun demikian, terdapat kepentingan golongan besar dari masyarakat yang dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah menjadi kepentingan nasional.

Dalam pelaksanaan politik luar negeri terlebih dahulu kita eksplorasi potensi dan kemampuan yang akan menjadi pendorong untuk bisa merealisasikan kewajiban yang dibebankan tersebut. Melihat pada totalis negara, Indonesia mempunyai kemampuan dan potensi yang cukup, seperti yang penulis gambarkan sebagai berikut :

#### 1. Geografi Indonesia

Letak geografis Indonesia berada dalam kedudukan yang penting yaitu berada diperempatan jalan dunia antara samudera Indonesia dan samudera pasifik antara benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia ini memberikan kedudukan Internasional yang penting, sulit diabaikan dan diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia ini untuk diperhitungkan. Keadaan demikian ini merupakan potensi dan kekuatan nasional yang harus dimanfaatkan. Indonesia dianggap memiliki posisi *life line* sehingga memiliki pengaruh dalam menjalin hubungan antara negara-negara lain dengan Indonesia.

## 2. Kekayaan Alam yang Potensial Berlimpah

Kekayaan alam yang berlimpah merupakan karunia Tuhan. Ini merupakan kemampuan potensial yang dapat dan harus dirubah menjadi kekuatan yang real. Kekayaan itu perlu digali menurut kekuatan nasional yang riil pula. Disinilah pentingnya politik luar negeri yang bebas aktif bukan politik yang memihak pada salah satu kekuatan raksasa negara didunia, misalnya dalam kasus sengketa wilayah Laut Cina Selatan ini. uang atau *foreign currency*, devisa, bukan satu-satunya modal tapi salah satu diantara banyak hal alat-alat untuk menggali modal alam tersebut.

Dengan adanya modal alam tersebut, telah menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk bisa mengatur sistem kerjasamanya "*system of cooperation*" dengan negara-negara lain terutama yang bertetangga langsung dengan Indonesia, karena memungkinkan *equal partnership* antara modal alam dan modal uang. Kerjasama yang harus diusahakan untuk saling membantu di kedua belah pihak yang bekerjasama dan saling mengisi. Kerjasama atas dasar antara negara yang bermodal uang dan kerjasama demikian harus bersih dari itikad dominasi dan eksploitasi.

## 3. Kekuatan Sumber Daya Manusia

Masalah sumber daya manusia sebagai tenaga kerja disamping faktor geografis dan kekayaan alam merupakan faktor yang penting pula. Didalam

negeri sumber daya manusia merupakan faktor proses produksi serta pembangunan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Didalam hubungan kemampuan pelaksanaan politik luar negeri. Faktor tersebut merupakan pendorong dan kekuatan sumber daya manusia.

#### 4. Kekuatan Ideologi

Negara Indonesia dalam tata kehidupannya dan bangsa Indonesia dalam seluruh hidupnya berjiwa dan berlandaskan kepada falsafah Pancasila. Pancasila adalah azas religious bangsa dan negara Indonesia. pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh para *founding fathers*, Pancasila telah dijadikan unsur pokok kaidah fundamental. Selama negara Republik Indonesia masih ada, pancasila merupakan kaidah hukum yang tidak dapat dirubah.

Pancasila merupakan kekuatan Ideologi, falsafah nasional rakyat dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kekuatan yang sangat penting dalam proses pemupukan kemampuan nasional Indonesia, menentukan sekali dalam hubungannya dengan dunia Internasional. Pancasila merupakan Falsafah yang dilahirkan di bumi Indonesia, tetapi bernilai Universal bagi seluruh umat manusia dan justeru nilai yang universal itulah kemampuan nasional yang sangat penting bagi dorongan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Hatta dalam pidatonya menyatakan pendirian politik luar negeri Indonesia sebagai berikut :

*“pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya”*.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan politik luar negeri diperlukan manuver dan diplomasi yang fleksibel, tidak dogmatis dan kaku, realistis dan pragmatis melalui pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kiranya perlu diberikan penjelasan mengenai corak bebas dan aktif dari politik luar negeri kita.

Menurut Johan Galtung, bahwa konflik adalah sebuah benturan fisik non verbal dimana akan muncul penghancuran. Hubungan antar actor yang membawa perbedaan itu mencetuskan kekerasan yang berakumulasi menjadi konflik. Adapun sumber konflik menurut Johan Galtung adalah perbedaan antar actor. (Galtung:2003). Sementara itu menurut Ralf Dahrendorf bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, satu diantaranya adalah konflik antar satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara atau organisasi internasional.

Pada konteks negara, konflik yang terjadi adalah perbedaan kepentingan nasional yang tidak bisa dikompromikan. Hal ini terjadi pada sengketa *Laut Cina Selatan*, Tiongkok meletakkan seluruh garis LCS merupakan wilayah negaranya, yang berdasarkan pada peninggalan peta Dinasti Yuan. Sementara itu empat negara Asean, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei mempertahankan wilayah LCS

---

<sup>18</sup>Hatta, M. *“Mendajung Diantara Dua Karang”*. Pidato disampaikan dalam rapat BPKNIP, Yogyakarta, Indonesia. Hal.9

merupakan bagian dari negaranya, karena merupakan peninggalan dari negara penjajah mereka, seperti Inggris.

Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, adalah sebagai berikut.

*“National interest is the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decisions makers of a state in makin foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements of constitute the state most vital needs. These include self-preservation, independence, teritotial integrity, military security, and economic well-being.”<sup>19</sup>*

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam perumusan politik kebijakan luar negeri suatu negara. selain itu, dalam mukhadimmah UUD 1945 telah secara jelas mengatakan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan ketertiban dunia. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum menjadi unsur yang sangat vital bagi sebuah negara, unsur tersebut mencakup berbagai prospek seperti kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Indonesia sebagai sebuah negara tentunya memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Terlebih bila ditambah dengan pemahaman konsep geopolitik

---

<sup>19</sup> Jack C. Plano. *The International Relations Dictionary*. USA. 1969. Hlm 7

yang dapat dimaknai dengan pengambilan kebijakan atau strategi nasional yang didasarkan pada aspek nasional dan geografik, maka tidaklah mengherankan apabila Indonesia turut berperan aktif dalam penyelesaian konflik *Laut Cina Selatan*.

Peran Indonesia dalam penanganan sengketa ini dapat dilihat pada saat pertemuan menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok di *Kunming* Ibukota Provinsi Yunan, Tiongkok pada tahun 2011. Indonesia menekankan pentingnya DOC atau deklarasi mengenai aturan-aturan bagi pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Menteri pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro menyatakan, melalui deklarasi ini diharapkan negara yang berkepentingan di wilayah tersebut dapat diatur oleh aturan main yang jelas. Karena selama ini aturan-aturan yang mengikat belum ada atau belum terlaksanakan.

Kegiatan ini merupakan peran terakhir dari Indonesia dalam kasus LCS di era SBY. Selain itu, pada tahun 2009 yakni pada bulan November tanggal 27-29 Indonesia mengadakan lokakarya mengenai LCS tersebut. Di kegiatan ini berlangsung dua kegiatan yaitu *Working Group Meeting (WGM) on the study of Tides and Sea Level Change and Their Impact on Coastal Environment in the South China Sea (SCS) Affected by Potential Climate Change* dan kegiatan kedua *Open Discussion Forum (ODF)* dengan tema “*Cooperation on Marine Biodiversity Protection in the South China Sea*”

Indonesia yang ditunjuk sebagai ketua ASEAN untuk periode tahun 2011 akan terus menjalankan perannya sebagai mediator sekaligus fasilitator sebagai upaya untuk menciptakan *Confidence Building Measure* dan sarana *Preventive Diplomacy* melalui peningkatan dialog ke arah upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Hal ini semata-mata dilakukan oleh Indonesia untuk menciptakan stabilitas perdamaian di kawasan *Laut Cina Selatan*. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2004 sampai tahun 2014 cukup berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan hubungan antara negara ASEAN dan Tiongkok.

Walaupun bukan termasuk sebagai negara yang sedang berkonflik, Indonesia diharapkan dapat menjadi penengah bagi negara-negara ASEAN apalagi sebagai negara yang mendeklarasikan berdirinya koalisi negara-negara Asia Tenggara. Selain itu Indonesia memiliki kedekatan historis secara ideologi dengan pemerintah Tiongkok. Misi perdamaian yang dibawa oleh pemerintah Indonesia harus tetap terjaga, mengingat kepentingan Indonesia juga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negaranya. Mengingat negara di kawasan *Laut Cina Selatan* bertetangga langsung dengan Indonesia, tidak menuntut kemungkinan seandainya konflik itu terjadi maka akan berdampak langsung pada keamanan dalam negeri Indonesia itu sendiri.

Istilah “bebas” dan “aktif” dikeluarkan oleh Mohammad Hatta dalam tulisannya di *foreign affairs :Foreign Policy of Republik Indonesia called “Free and*

*Active” Politics. Free means to determine their own way are not affected by any party, actively means toward peace and friendship with all nation”*.<sup>20</sup>

Sedangkan politik luar negeri bebas aktif menurut Mohtar Kusumaatmadja diartika:

- Bebas berarti tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila.
- Aktif artinya dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak pasif reaktif atas kejadian-kejadian Internasional melainkan aktif.<sup>21</sup>

Dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif tersebut, Indonesia menempatkan dirinya sebagai subjek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai objek, sehingga Indonesia tidak dapat dikenalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan kepentingan-kepentingan nasional negara lain itu sendiri.

Haluan politik luar negeri Indonesia ditegaskan oleh Hatta :*“percaya kepada diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri”*. Hatta melihat pertarungan politik internasional pada saat itu didominasi oleh dua kekuatan

---

<sup>20</sup> Mansyur, Shohib. *“sekilas tentang politik luar negeri Indonesia”*. dalam Ambar Retnosih tentang *“Politik Luar Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009 terhadap Integrasi ASEAN”*. Tesis. UGM, Yogyakarta

<sup>21</sup> Kusumaatmaja, Mochtar. 1983. *“Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini”*. Bandung : Penerbit Alumni. Hal. 7

superpower yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Menyikapi pertarungan tersebut, Hatta menyatakan bahwa Indonesia mendasarkan sikapnya pada kepentingan nasional yang menentukan sikap dan posisi Indonesia di kancah global. Kepentingan nasional tersebut mengacu pada “politik ke dalam” yang berisi strategi-strategi pembangunan pemerintahan.

Penjelasan Mohammad Hatta dari pidato “*Mendajung diantara dua Karang*” menampilkan dua diskursus utama dalam haluan politik luar negeri Indonesia. *Pertama* haluan politik luar negeri Indonesia yang bertumpu pada kepentingan nasional yang menentukan posisi dan sikap politik Indonesia. *Kedua* kepentingan nasional tersebut sangat berkaitan dengan diskursus tentang pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah di dalam negeri.

### **C. Platform Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri Indonesia yang diabdikan kepada kepentingan nasional atau kepentingan amanat penderitaan rakyat, agar benar-benar dilaksanakan sebaik mungkin harus bisa menyesuaikan dinamika kerjasama internasional. Karena di dalam usaha pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menuju pembentukan dunia baru dengan berdasar Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 perlu dibentuk platform politik secara bertahap.

Tahap-tahap platform politik luar negeri dengan memperhatikan kepentingan nasional sebagai landasan pokok yang mendorong kearah terciptanya politik luar negeri yang bertentangan di Asia Tenggara dan dengan Solidaritas Asia-Afrika di sertai politik berdampingan secara damai menuju ke arah tata tertib dan susunan dunia baru yang damai dan sejahtera. Tahap-tahap platform politik dibentuk yang sifatnya nasional, regional dan global.

#### 1. Platform Nasional

Platform nasional didasarkan pada kondisi demoestik. Kita harus mempunyai dasar dimana seluruh rakyat dan bangsa Indonesia berdiri dan bersatu memberikan dukungannya pada pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Ciri-ciri nya anti kolonialisme dan imperialism, mengabdikan pada amanat penderitaan rakyat dalam proses membentuk dunia baru, berlandaskan falsafah Pancasila (secara adil), berlandaskan struktural UUD 1945 dengan sasarannya ialah kepentingan nasional.

Sedangkan tujuan terakhir adalah membentuk tertib dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berpangkal inilah maka didalam negeri perlu dibangun suatu kekuatan ampuh dan tangguh sebagai satu platform politik. kemudian melangkah secara bertahap berikutnya yaitu wilayah yang lebih luas diluar negeri dalam hubungan dunia internasional.

#### 2. Platform Regional

Negara Indonesia secara geografis terletak diperempatan jalan yang disebut *life line*. Disamping letak kedudukan itu wilayahnya juga termasuk dalam daerah regional Asia Tenggara (ASEAN). Dalam regional ASEAN termasuk negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, Cambodia, Brunei Darussalam. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara tetangga Indonesia yang terdekat disebelah utara. Sebelah selatan Indonesia terdapat dua negara yakni Australia dan Selandia Baru. Kedua negara ini terletak dalam benua yang terpisah satu dengan lainnya.

Dengan negara-negara tetangga, Indonesia menjalankan politik tetangga yang baik atau "*good neighbourhood policy*". *Good neighbourhood policy* yang dilakukan oleh Indonesia ini harus mempunyai makna yang aktif sesuai dengan pengertian dari *subject policy*, dalam hal ini pada sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan sebagian besar negara-negara yang ada di regional ASEAN. Indonesia tidak sekedar untuk menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara sekitar Indonesia saja. Tetapi juga harus aktif menyelenggarakan segala sesuatu, supaya negara-negara tetangga Indonesia bersikap baik terhadap Indonesia.

### 3. Platform Kontinental

Maksud dari platform ini, yaitu daerah operasi politik luar negeri Indonesia meliputi wilayah Asia Afrika. Sasaran politik luar negeri di wilayah Asia Afrika telah dirintis dan proses pelaksanaan yang baik, terutama dari sukse

politik luar negeri Indonesia dengan adanya konferensi Asia-Afrika ke-1 di Bandung pada tahun 1955. Konferensi Bandung telah melahirkan Dasa Sila Bandung yang berisi suatu deklarasi negara-negara Asia-Afrika untuk memajukan kerjasama perdamaian dunia. Deklarasi Bandung ini merupakan hal prinsip bagi negara-negara anggota untuk kemajuan sosial, standar hidup yang lebih tinggi dan kebebasan.

Hasil konferensi Bandung menyatakan bahwa negara-negara Asia Afrika tergolong sebagai “*underdeveloped countries*”. Ini dilihat dari sudut pandang eropa, Amerika dan Australia. Negara-negara Asia-Afrika yang bertujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi untuk mencapai kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik.

#### 4. Platform Interkontinental

Dalam kerangka menyusun platform politik interkonintal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia maka dipergunakan suatu prinsip “*peaceful to existence*”. Prinsip ini mengandung nilai hak setiap bangsa untuk merdeka, mandiri dalam ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Prinsip ini juga sebagai landasan dalam hubungan internasional. Negara-negara yang berpolitik bebas aktif meliputi perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme.

## 5. Platform Global

Setelah Indonesia memulihkan kembali kedaulatannya pada tahun 1950, Republik Indonesia di terima menjadi anggota dari PBB. Forum PBB bagi Indonesia dijadikan platform politik global. Selain itu, di forum ini juga, bangsa Indonesia menggunakannya sebagai media dalam melaksanakan tujuan nasionalnya baik bagi kepentingan rakyat dan negaranya, sekaligus untuk mewujudkan tata kehidupan dunia yang baru.

### **D. Politik Luar Negeri Indonesia Pada era Susilo Bambang Yudhoyono**

Telah banyak studi yang dilakukan dalam bentuk biografi, sejarah diplomasi, analisis strategi dan tindakan diplomatic dari sudut power dan kepentingan nasional. Para penulisnya menjelaskan berbagai keputusan penting yang mereka pilih sebagai bagian untuk studi. Beberapa karya mereka bahkan berusaha memprediksi keputusan-keputusan politik. beberapa karya ilmuan politik yang berorientasi *scientific* Burton, Sapin dan Snyder berusaha memilah sistem kepercayaan individu para *decion maker* untuk memperhitungkan dampak variable peranan, *ideosinkretik*, birokratik, nasional dan sistematis terhadap tipe serta peringkat peserta keputusan dan tindakan resmi.

Snyder mempertanyakan konseptual politik luar negeri tradisional yang menganggap negara sebagai pribadi atau mempersonifikasikan negara. mereka memfokuskan perhatian pada *decision maker* yang berbicara dan bertindak atas

nama negara. dunia nyata diasumsikan sebenarnya tidak ada. yang ada adalah persepsi yang kemudian membentuk pandangan pengambil keputusan tentang realita. Kemudian sebagai dasar keputusan-keputusan berikutnya. Snyder membandingkan kelompok pejabat yang menjadi penasihat pemimpin eksekutif sebagai sebuah filter raksasa yang memproses variable-variabel yang tidak terhitung banyaknya termasuk kepercayaan dan peranan pembuat keputusan, tuntutan birokrasi, kepentingan politik dan sosial kendala-kendala dibelahan bumi lainnya terhadap kebijaksanaan mereka.<sup>22</sup>

James Rosenau telah memberikan sumbangannya yang besar terhadap teori pembuat keputusan. Konsepnya mengenai isu area membantu kita untuk mendalami gagasan yang menyatakan bahwa tidak ada kelompok pembuat keputusan dalam politik internasional secara tunggal, tetapi tim tersebut komposisinya berbeda-beda sesuai dengan isu area yang dipermasalahkan.

Salah satu karya Rosenau yang lain dan yang tidak kalah penting yaitu mengenai *linkage theory* yang berbentuk analogi peranan domestic dalam politik internasional. Maksudnya tidak ada politik luar negeri yang dibuat tanpa mengaitkan dengan konsekuensi-konsekuensi domestic dan sebaliknya. Politik luar negeri Indonesia tergantung pada 3 hal, yaitu : postur Indonesia, posisi Indonesia, dan krisis yang terjadi dalam negeri Indonesia.

---

<sup>22</sup>Soeprapto, R, "Hubungan Internasional, Sistem Interaksi dan Perilaku".Hal. 197-200

Ada perubahan kebijakan luar negeri pada masa sebelum reformasi dengan sesudah masa reformasi. Kebijakan Luar Negeri masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih senada dengan para pemimpin sebelumnya yaitu pemerintahan pasca 1998 (BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati) Indonesia masih mengalami keterpurukkan ekonomi setelah krisis dikawasan 1997-1998.

Situasi politik domestic juga mengalami berbagai persoalan stabilitas keamanan dan separatism di sebagian wilayah Indonesia. Sehingga fokus kebijakan dan diplomasi politik luar negeri yaitu memulihkan kembali citra Indonesia di Dunia Internasional. Pemerintah juga berusaha menarik investasi asing dengan menjalin kerjasama dengan banyak negara. Adanya perubahan goal pun dijadikannya sebagai kesempatan positif untuk berkiprah di dunia internasional.

Gaya kebijakan luar negeri ini berbeda dengan masa awal digulirkannya kebijakan luar negeri bebas aktif. Muhammad Hatta menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia yang diumpamakan dalam pepatah “ *Bagaikan mendayung di antara 2 karang*” sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan

perumpamaan “*navigating in the turbulence ocean*”. Artinya mengarungi lautan yang bergelombang sehingga dibutuhkan nahkoda yang berpengalaman.<sup>23</sup>

Dalam pidatonya pada bulan Mei tahun 2005, Presiden SBY memperkenalkan suatu konsep baru mengenai politik luar negeri Indonesia yaitu kebijakan luar negeri “konstruktivis”.<sup>24</sup> Menurut SBY, politik bebas aktif yang dijalankan oleh Indonesia tidak hanya asal bebas dan aktif, tetapi juga harus konstruktif untuk kepentingan nasional. Kebijakan ini pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu; (1) pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri; (2) masalah konektifitas yang sehat, yaitu keterkaitan kita dalam urusan-urusan internasional dan sistem global. Dalam konteks konektifitas inilah Indonesia melakukan serangkaian diplomasi; dan (3) identitas internasional yang solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestic dan diplomatiknya.

Dengan demikian diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) dituntut untuk turut mengaktualisasikan program dan prioritas kabinet Indonesia bersatu pimpinan SBY yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total yang memprioritaskan agenda pada lima sasaran, yaitu

---

<sup>23</sup> Setyawati, Siti, “*Relevansi Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dalam Arsitektur Perubahan Tatanan POLitik Internasional*”. Dalam seminar “Refleksi 65 Tahun Politik Luar Negeri Indonesia Bebas AKtif”. Yogyakarta September 2013.

<sup>24</sup> [http://www.deplu.go.id/?hotnews\\_id=1081](http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=1081). Diakses pada tanggal 15 April 2016

untuk mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan damai, lebih adil, lebih demokratis, lebih sejahtera dan mengembangkan kerjasama internasional.

Sejalan dengan pelaksanaan diplomasi total tersebut, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 109/2001 Deplu RI telah melakukan restrukturasi organisasinya dengan suatu harapan agar lembaga ini lebih siap untuk menjalankan diplomasi secara total bersama aktor-aktor lain baik dalam tubuh pemerintahan maupun diluar pemerintah. Restrukturasi Deplu diharapkan akan membawa dampak yang luas terhadap formulasi dan implementasi politik luar negeri Indonesia saat ini maupun dimasa yang akan datang. Restrukturasi ini dipersepsikan sebagai bentuk penyesuaian Deplu terhadap tantangan lingkungan eksternal yang cepat berubah.

Dalam lingkup tugasnya sebagai penyelenggran hubungan luar negeri, disini Deplu berupaya melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerapkan agenda utama yang ditetapkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Di era reformasi ini melalui kabinet Indonesia Bersatu, Presiden SBY menempatkan landasan operasional politik luar negerinya dalam tiga program utama nasional kebijakan luar negeri yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009,<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Ganewati Wuryandari (ed), *Op.Cit*, hal. 39

- a. Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional.
- b. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional terutama kerjasama ASEAN, APEC dan kerjasama multilateral lainnya, dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia.
- c. Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme dalam memecahkan berbagai persoalan keamanan internasional. Dalam kaitan ini salah satu kegiatan pokok yang dilakukan adalah partisipasi untuk menciptakan perdamaian dunia, misalnya dalam hal sengketa di Laut Cina Selatan. komitmen ini sangat relevan dengan tujuan hidup dari Bangsa Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan bahasa yang lebih lugas, RPJMN 2004-2009 mengartikulasikan konstalasi politik internasional yang terus mengalami perubahan-perubahan yang

sangat cepat sebagai peluang untuk lebih banyak memainkan peran Indonesia dalam politik luar negeri dan kerja sama, baik ditingkat regional maupun internasional.

Berdasarkan apa yang dikemukakan terdahulu, tampak bahwa keadaan ekonomi dalam negeri, situasi internasional dan kepribadian pemimpin maupun ideologi (sistem nilai) yang dianutnya akan banyak mempengaruhi perkembangan serta perubahan politik luar negeri, termasuk tentunya kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Sebagaimana diketahui, kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan pada asas politik luar negeri bebas aktif.

Asas dan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu tentu tetap harus menjadi pegangan. Politik luar negeri bebas aktif itu sendiri secara historis merupakan pengejawantahan dari buah pemikiran Bung Hatta yang terangkum dalam karya legendarisnya berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang". Politik luar negeri bebas aktif secara harfiah memiliki makna dasar sebagai suatu kondisi bebas dan tidak terikat, namun tetap bersikap aktif dalam konteks hubungan antarbangsa, baik di tingkat regional maupun internasional.

Keputusan Indonesia untuk tidak ikut mendukung dan bergabung dengan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dalam Perang Irak (2003) misalnya, merupakan cerminan nyata dan konsekuensi logis dari penerapan politik luar negeri bebas aktif tersebut. Dalam konteks hubungan internasional, Presiden RI

pasti akan menjadikan politik luar negeri sebagai bagian penting yang harus dijalankan Pemerintah Indonesia. Situasi internasional yang penuh dinamika menuntut kepiawaian seorang presiden dalam menjalankan politik luar negerinya dengan tetap berpedoman pada politik luar negeri yang bebas aktif.

Masalah pelik yang masih dihadapi misalnya soal perang terhadap terorisme dan penyelesaian konflik Timur Tengah, selain soal perbatasan serta masalah seni dan budaya dengan Malaysia yang merupakan isu sensitif di dalam negeri. Di lain pihak upaya untuk terus menumbuhkan semangat dan solidaritas ASEAN merupakan tantangan tersendiri yang tidak ringan.

Perhatian terutama mesti diarahkan terhadap tercapainya stabilitas perekonomian nasional, sebab faktor ini akan membantu terciptanya stabilitas sosial, politik dan keamanan. Pemerintah perlu melihat bagaimana negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina mampu keluar dari krisis ekonomi dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama.

Dalam situasi internasional yang penuh dinamika dan benturan kepentingan, kiprah Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa nampaknya masih dominan, bahkan di bidang ekonomi dalam batas-batas tertentu Indonesia masih membutuhkan Amerika, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Meski demikian, Pemerintah RI harus terus berupaya mempertahankan

politik luar negeri bebas aktif secara konsisten dan pemerintah dituntut supaya melaksanakan politik luar negeri yang seluwes mungkin tanpa mengabaikan kepentingan nasional Indonesia. Masalahnya, di dunia internasional pencitraan Indonesia sampai sejauh ini dapat dikatakan masih relatif lemah, terlebih dengan adanya peledakan bom di Jakarta belum waktu yang lalu serta ramainya pemberitaan indikasi pelemahan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta soal dana talangan Bank Century yang bermasalah.

Dengan melihat rumitnya permasalahan internasional dan domestik, maka tampak bahwa ke depan Indonesia juga memerlukan upaya-upaya *public relations* (PR) negara secara lebih serius. Sebab, figur presiden yang reformis, demokratis, dan berwawasan internasional hampir tidak ada artinya tanpa adanya PR negara yang handal.